BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persaingan yang telah terjadi diantara perusahaan dimasa sekarang menghasilkan produk menyebabkan persaingan yang dalam. Dampak atas persaingan ini menyebabkan banyaknya pilihan produk atau jasa berbagai macam spesifikasi serta mutu, sehingga terdapat tuntutan pada perusahaan untuk memperbaiki serta menjaga standar mutu kualitas produk atau jasa.¹

Pemenuhan kebutuhan konsumen merupakan implementasi bagi perusahaan dalam kegiatan produksi. Prinsipnya dalam memproduksi suatu produk atau jasa yang memiliki kualitas tinggi, pengawasan merupakan kunci untuk mencapai hal tersebut. Sehingga dalam menjalankan suatu proses produksi tidak akan ada kejanggalan produk yang akan dipasarkan dan tentunya akan berdampak baik bagi perusahaan dan konsumennya.² Aktivitas dalam mengkoordinasi kegiatan dalam tercapainya efisiensi dan efektifitas produksi merupakan tujuan dari pengawasan produksi. Pengawasan tersebut merupakan mekanisme menyeluruh selama proses produksi yang dipakai dalam perusahaan sehingga sesuai dengan perencanaan baik dari hal biaya, harga, serta mutu barang.

Secara idealnya pengawasan hanya memberikan petunjuk serta nasihat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberhasilan atas pengawasan secara baik jika tidak terdapat kendala selama proses produksi seta proses yang

¹ Agus Ahyari, *“Manajemen Produksi Perencanaan Sistem Produksi,”* 4 Ed. (Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM, 2003) 53, T.T.

² Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021), 5.

diharapkan sudah sesuai. Terlebih lagi bagi perusahaan yang memproduksi bahan pangan, penting sekali menerapkan serta menjaga standarisasi kehalalan dalam setiap produknya.

Pada dasarnya keberadaan jaminan produk pangan berangkat dari informasi yang benar, jelas, dan lengkap. Baik secara kuantitatif maupun kualitas dari produk pangan yang mereka konsumsi. Dengan demikian praktik-praktik kadaluarsa, pemakaian bahan pewarna yang tidak diperuntukkan bagi pangan dan penggunaan bahan-bahan berbahaya lainnya serta perbuatan yang mengakibatkan kerugian masyarakat, bahkan mengancam jiwa, keselamatan dan kesehatan dapat terhindar.³

Jaminan Halal harus segera dilakukan, pemenuhan tersebut sekaligus memberi jaminan dari perlindungan pemerintah kepada konsumen. Menurut UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan pasal 30 ayat (1) dan (2) menggariskan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib untuk mencantumkan labelisasi halal agar konsumen terhindar dari mengkonsumsi yang tidak halal.

Pengembangan produk halal sudah menjadi perhatian yang tersendiri oleh pemerintah, akan tetapi masih banyak dari kalangan masyarakat khususnya orang muslim yang meragukan dan mempertanyakan akan berlakunya program sertifikasi atau labelisasi halal bagi produk UMKM. Padahal setelah melakukan analisis program tersebut memiliki banyak kontribusi bagi pelaku produk UMKM sendiri semisal; dalam aspek pemasaran, kelayakan halal, kesehatan, dan harga jual. Sama seperti

³ K. N. Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif: Regulasi dan Implementasi Di Indonesia*, Cetakan I (Sleman, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014). hlm, 23

penjelasan yang ada bahwa dengan adanya jaminan produk halal maka pelaku usaha dapat meningkatkan nilai tambah untuk memproduksi dan menjual produk halalnya. Selain itu, JPH (Jaminan Pangan Halal) juga meningkatkan daya saing produk di global market, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi bangsa.⁴

Studi penelitian ini bertempat di MUI Kota Kediri yang merupakan sebuah lembaga atau wadah yang bergerak dalam bidang pemeriksaan, pemeliharaan, serta pengawasan terhadap nilai mutu suatu produk UKM atau IKM baik berupa produk fisik atau Jasa. Di dalamnya terhimpun para Ulama', Zuama dan cendekiawan muslim Indonesia. Memiliki asan dan tujuan mewujudkan masyarakat yang berkualitas (*Khaira' Ummah*), dan negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah yang *baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur*.⁵

Secara umum, MUI sudah memiliki jejaring kinerja hingga kedaerah dan provinsi. Adapun MUI Kota Kediri merupakan pengembangan MUI daerah, karena untuk menjawab keraguan masyarakat bahwa MUI belum bisa menyeluruh di Indonesia. MUI Kota Kediri diketuai oleh KH. Abdulloh Kafabihi Mahrus dengan masa khidmah 2019-2024, selain itu, MUI Kota Kediri memiliki program-program terdahulu yang menjunjung UMKM berbasis Syariah, seperti pelatihan dan pendampingan UMKM perintis era digital 4.0 berbasis Syariah. Sering kali MUI Kota Kediri memiliki jaringan atau kerja sama dengan Kadin Kota Kediri, BI (Bank Indonesia) dan lainnya dalam melaksanakan setiap program-programnya. Dari identifikasi masalah

⁴ BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), Kepala BPJPH Sosialisasikan UU JPH Pada Pelaku Usaha.

⁵ K. N. Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif: Regulasi dan Implementasi Di Indonesia*, Cetakan I (Sleman, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014). hlm, 24

uraian-uraian diatas, maka perlu diberlakukan kajian manajemen LPPOM MUI serta pengawasan dalam memberikan perlindungan dan jaminan produk yang tersertifikasi halal. Dengan mengetahui akan pentingnya program JPH dari pemerintah, maka akan memiliki pengaruh bagi pelaku UMKM sendiri. Dari sini kami ingi membahas tentang:

“ANALISIS MANAJEMEN PELAYANAN KEBIJAKAN PUBLIK LPPOM MUI DALAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN PRODUK YANG TERSERTIFIKASI HALAL (Studi Kasus Pelayanan Pengawasan MUI Pada Pelaku Usaha di MUI Kota Kediri)”

B. Rumusan Masalah

Agar Penelitian ini lebih terarah dan komprehensif, Penulis mengemukakan beberapa masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelayanan LPPOM di MUI Kota Kediri?
2. Bagaimana kendala manajemen pelayanan LPPOM di MUI Kota Kediri dalam melayani UMKM?
3. Bagaimana manajemen pelayanan LPPOM di MUI Kota Kediri ditinjau dari teori kebijakan publik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan, Penulis merumuskan penelitian sebagai berikut:

1. Menjelaskan dan menganalisis hakikat dan ruang lingkup proses pelayanan LPPOM MUI di Kota Kediri.
2. Menjelaskan kendala manajemen pelayanan LPPOM di MUI Kota Kediri dalam melayani UMKM.

3. Menjelaskan manajemen pelayanan LPPOM di MUI Kota Kediri ditinjau dari teori kebijakan publik

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan ada dua manfaat yaitu secara ilmiah dan praktis.

1. Kegunaan Ilmiah

- a. Penelitian ini diharapkan agar kita dapat memahami sertifikasi halal bagi pelaku atau produk UMKM, karena sertifikasi halal merupakan sebuah program jaminan halal dari pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan kualitas, keamanan, dan kelayakan harga jual bagi pelaku UMKM atau konsumen.
- b. Penelitian ini juga diharapkan menambah khazanah keilmuan kita tentang manajemen LPPOM MUI dalam pengawasan produk yang tersertifikasi halal menurut teori kebijakan publik, baik untuk melatih Mahasiswa dalam memahami JPH dari berbagai pengamatan, bahkan bisa dijadikan rujukan bagi mereka yang membutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Terutama bagi pelaku UMKM dalam memproduksi pangan baik berupa makanan ataupun minuman.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi literasi bagi pemerhati JPH atau ekonomi Syariah negara Indonesia, dan sekaligus menjadi bahan sumber informasi mengenai kajian

“Sertifikasi Halal Bagi Produk UMKM. Serta diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman jaminan perlindungan halal.

E. Definisi Operasional

Dalam pembahasan ini dimaksudkan supaya tidak ada kesalahan atau salah penafsiran dari penelitian ini yang berjudul “**ANALISIS MANAJEMEN PELAYANAN KEBIJAKAN PUBLIK LPPOM MUI DALAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN PRODUK YANG TERSERTIFIKASI HALAL (Studi Kasus Pelayanan Pengawasan MUI Pada Pelaku Usaha di MUI Kota Kediri)**”, sebagai berikut:

1. Sertifikasi Halal merupakan bentuk implemetasi atas langkah strategis melindungi umat dari peredaran produk pangan yang mengandung bahan non Halal, yang mana program ini berada di bawah Majelis Ulama’ Indonesia (MUI). Sesuai dengan SK No. 018/MUII/1989 tertanggal 6 Januari 1989/26 Jumadil Awal 1409 H MUI mendirikan Lembaga Khusus untu pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) untuk mengawasi proses sertifikasi halal tersebut.⁶
2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah sebuah usaha yang mayoritas masyarakat Indonesia melakukannya. Indonesia sendiri lebih focus dan berpacu pada UMKM karena memiliki kinerja yang produktif, dan meningkatkan efisiensi yang tinggi tanpa harus bergantung pada perusahaan yang besar. Maka seperti itu, UMKM selalu menjadi garda terdepan tombak bagi negara Indonesia.

⁶ Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif*. hlm. 24

3. Kebijakan publik merupakan salah satu komponen negara yang tidak boleh diabaikan. Negara tanpa komponen kebijakan publik dipandang gagal, karena kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang atau kelompok orang saja, yang bekerja seperti tiran, dengan tujuan untuk memuaskan diri atau kelompok saja.⁷ Kekuasaan negara yang dimiliki tidak dapat dipertahankan hanya dengan kekuatan paksa, tetapi memerlukan kebijakan.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Pada umumnya, kegiatan ekonomi yang terjadi adalah bagaimana hubungan antara pelaku ekonomi atau bisnis, seperti produsen dengan konsumen dan pemerintah sebagai regulator. Regulasi sendiri berfungsi untuk mengatur semua aktifitas bisnis agar tercipta kegiatan bisnis yang sehat dan akhirnya menciptakan kesejahteraan bagi semua masyarakat.⁸ Demikian juga halnya dengan jaminan halal perlunya kepastian terhadap produk pangan yang mana menjadi satu sektor yang sangat penting, karena berhubungan dengan konsumen dan pelaku usaha.

Adapun kerangka teori yang dipergunakan untuk menelaah penelitian ini yaitu:

1. Sertifikasi Halal

Menurut Majelis Ulama' Indonesia merupakan fatwa atau hukum tertulis yang dikeluarkan oleh MUI dengan menyatakan kehalalan sebuah produk makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetika sesuai dengan syariat Islam. Lain halnya dengan

⁷ Nugroho, Riant. 2009. Public Policy. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo. hlm. 46

⁸ Joni Emirzon, *Hukum Usaha Jasa Penilai Dari Perspektif Good Corporate Governance*. Universitas Diponegoro Semarang, 2007, Hlm.29.

Undang-undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau bisa disebut dengan Sertifikasi Halal adalah sebuah surat keterangan pengakuan kehalalan suatu produk yang kemudian dikeluarkan melalui Badan Penyelia Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa atau hukum tertulis dari Majelis Ulama' Indonesia.⁹

Sertifikasi Halal banyak memiliki peran aktif atau kegunaan secara khusus seperti; untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen, meningkatkan penjualan dan memperluas pemasaran.¹⁰ Sedangkan di aspek lainnya sertifikasi halal menjadi langkah strategis untuk mempertahankan konsumen bagi perusahaan, meningkatkan daya saing serta memberikan nilai tambah pada suatu produk.¹¹

Labelisasi dan sertifikasi halal memiliki respon yang positif terhadap peningkatan *profit*¹² serta dapat memperluas pasar global bahkan dapat membuka pintu ekspor bagi setiap pelaku usaha atau UMKM.¹³

Sertifikasi Halal oleh MUI memainkan peran yang efisien karena memiliki konsep ketelitian sebagai pemeriksaan produk dan

⁹ UU No.33 Tahun 2014.

¹⁰ Mohamed Yunos, R., Mahmood, C. F. C. And Abdul Mansor, N. H. "*Compliance To Halal Certification - ITS Impact On Business Financial Performance*", Recent Trends In Social And Behaviour Sciences - Proceedings Of The 2nd International Congress On Interdisciplinary Behavior And Social Sciences, (2014) hlm. 66

¹¹ Salindal, N. A. Et Al. "*A Structural Equation Model Of The Halal Certification And Its Business Performance Impact On Food Companies*", International Journal Of Economics, Management And Accounting, 1(1), (Pp. 185–206, 2018) hlm. 23

¹² Perdana, Firdaus Fanny, P. And Kartika, B. "*The Importance Of The Halal Certification Based On Imam Nursi ' S Concept Of Frugality*", International Conference On Halal Innovation In Products And Service 2018, (July), (Pp. 127–129. 2018). hlm. 43

¹³ Ridhiyah, N. (PROGRAM S. H. E. S. Et Al. "*Sertifikasi Halal Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*", (Hukum Ekonomi Syariah. 2019) hlm. 12

memenuhi persyaratan higienis, sanitasi, dan keselamatan. Produk yang di sertifikasi halal oleh dewan dapat menggunakan logo halal merek dagang yang terdaftar.

Seperti keterangan diatas, Indonesia memiliki pedoman sertifikasi halal yang sudah tertulis du Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Merujuk terhadap pernyataan UU, maka mulai bulan Oktober 2019 setiap produk usaha wajib mengikuti sertifikasi halal, meliputi; pangan, obat-obatan, kosmetika, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan produk gunaan. Akan tetapi, masih faktor yang melatar belakangi Produk UMKM di Indonesia yang kurang berkembang, seperti;

1. Rendahnya kesadaran masyarakat atau pelaku UMKM dalam mensertifikasi halal produknya.
2. Kurang mengikuti atau mengetahui akan pentingnya sertifikasi halal serta dampak yang akan diterima terhadap pelaku UMKM.¹⁴
3. Pelaku UMKM merasa bahwa sertifikasi halal itu mahal harganya karena terkendala masalah biaya pendaftaran.
4. Kerumitan melakukan sertifikasi karena untuk memperoleh legalitas sertifikasi halal panjang prosesnya mulai dari

¹⁴ Agustina, Y. Et Al. "Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM)", Jurnal Graha Pengabdian, 1(2), (Pp. 139–150. 2019) hlm. 28

permohonan hingga penerbitan sertifikat, serta jangka waktu berlaku sertifikat hanya berjarak 2 tahun.¹⁵

2. Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan salah satu komponen negara yang tidak boleh diabaikan. Negara tanpa komponen kebijakan publik dipandang gagal, karena kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang atau sekelompok orang saja, yang bekerja seperti tiran, dengan tujuan hanya memuaskan dirinya sendiri atau kelompok saja.¹⁶ Pemerintah melakukan pelayanan publik, karena pemerintah merupakan badan publik yang diadakan tidak lain hanya untuk melayani kepentingan publik. Dalam realitas relasi pemerintah-masyarakat, sebagai pihak yang menguasai sumber daya politik, ekonomi, budaya dan militer. Memiliki posisi superordinat, yakni pihak yang sangat berkuasa dalam mengatur dan mengendalikan warga masyarakat, termasuk didalamnya pedagang atau pelaku usaha kecil seperti PKL.

Maka dari itu, penulis ingin menganalisis prioritas solusi yang ditawarkan dalam meningkatkan sertifikasi halal dan menganalisis prioritas strategi yang dapat diterapkan oleh LPH (Lembaga Penyelia Halal) dalam meningkatkan kualitas, daya minat pelaku UMKM, serta menjamin kehalalan produk.

¹⁵ Sari, M., *"Peluang Dan Tantangan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Usaha Kecil Dan Menengah Di Kota Jambi"*, (Pp. 1–107, 2019) hlm. 39

¹⁶ Eko Handoyo, *Kebijakan Publik*, Pertama (Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang Widya Karya, T.T.). hlm. 44

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, peneliti disusun dengan sistematika yang lebih jelas, dengan susunan sebagai berikut: ***“ANALISIS MANAJEMEN PELAYANAN KEBIJAKAN PUBLIK LPPOM MUI DALAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN PRODUK YANG TERSERTIFIKASI HALAL (Studi Kasus Pelayanan Pengawasan MUI Pada Pelaku Usaha di MUI Kota Kediri)”***.

Sementara Bab pertama berisi tentang pendahuluan; meliputi Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

Di Bab kedua menguraikan tentang kajian teori atau tinjauan umum tentang manajemen pelayanan, perlindungan dan jaminan produk halal menurut Islam di Indonesia dan pengawasan LPPOM di MUI Kota Kediri terhadap produk usaha yang tersertifikasi halal.

Bab ketiga peneliti menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitiannya. Adapun metode yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif.

Bab keempat peneliti memaparkan data dan hasil penelitian tentang analisis manajemen pelayanan kebijakan publik terhadap proses pengawasan LPPOM di MUI Kota Kediri dalam pasca sertifikasi halal produk berdasarkan kajian pustaka yang telah diperoleh dari lapangan.

Bab kelima adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil akhir penelitian dan saran yang berkaitan dengan judul penelitian.